

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BONE**

**Sulfiana<sup>1</sup>, Muhammad Yahya<sup>2</sup>, Hafiz Elfiansyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email\*: [sulfianasyam08@gmail.com](mailto:sulfianasyam08@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatanteknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah dikantorBapenda secara parsial dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dikantor Bapenda simultan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 32 responden yang terdiri dari pegawai BAPENDA Kab. Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemanfaatan perangkat informasi secara parsial mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai thitung (1,1498) > ttabel (2,045) artinya berpengaruh dan nilai signifikan sebesar 0,018 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara pemanfaatan perangkat informasi terhadap kinerja instansi pemerintah. 2) Pengendalian internal secara parsial mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai thitung (4,071) > ttabel (2,045) artinya berpengaruh dan nilai signifikan sebesar <0,001 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara pengendalian interternal terhadap kinerja instansi pemerintah. 3) Pemanfaatan perangkat informasi dan pengendalian internal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap k kinerja instansi pemerintah. dengan nilai Fhitung sebesar 149,813 dan nilai Ftabel 4,20 berarti Pemanfaatan perangkat informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

**Kata kunci:** Internal control; Government Performance; Regional Income

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of the use of information technology and internal control on government performance at the Bapenda office partially and the effect of the use of information technology and internal control on government performance at the Bapenda office simultaneously. The method used is a quantitative research method. This study used 32 respondents consisting of BAPENDA Bone Regency. The results of the study show that 1) The use of information tools partially has a relationship and influences the performance of government agencies with a tcount (1.1498) > ttable (2.045) meaning that it is influential and a significant value is 0.018 < 0.05, then H0 is rejected and H1 is accepted . It can be concluded partially that there is an influence between the use of information tools on the*

*performance of government agencies. 2) Internal control partially has a relationship and influence on the performance of government agencies with a value of  $t_{count}$  (4.071) >  $t_{table}$  (2.045) meaning that it has an effect and a significant value of  $<0.001 <0.05$ , then  $H_0$  is rejected and  $H_1$  is accepted. It can be concluded partially that there is an influence between internal control on the performance of government agencies. 3) Simultaneous use of information tools and internal controls has no significant effect on the performance of government agencies. with an  $F_{count}$  value of 149.813 and a  $F_{table}$  value of 4.20 means Utilization of information tools and internal control on the performance of government agencies.*

**Keywords:** *Internal control; Government Performance; Regional Income*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan teknologi informasi pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena suatu kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif (Nasir & Oktari, 2011; Siti Maryam, 2017). Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai kedua bidang tersebut (Nauap et al., 2016).

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Kawulur et al., 2019; Kurniawan, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, defenisi atau arti otonomi daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nasir & Oktari, 2011; Siti Maryam, 2017).

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan adalah pemanfaatan teknologi informasi (Ahyari & Ayem, 2019; Pituringsih, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi kemudahan bagi manajemen dalam instansi pemerintahan dalam menciptakan, menjalankan dan mengawasi menegenai kebijakan yang telah ditetapkan. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat pada saat ini. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi (Nasir & Oktari, 2011).

Kualitas pengendalian internal juga bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut mulai dari tingkatan pimpinan organisasi hingga Pegawai di tingkat paling bawah (Haryadi, 2009). PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pasal 1 menyatakan: Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainyatujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan Iptek, khususnya untuk kepentingan bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sector tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui E-Government (Iskandar et al., 2019; Santoso et al., 2020). Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan E-Goverment menjadi lebih fleksibel dan lebih

berorientasi pada kepuasan pengguna (A'yun & Hartaman, 2021). Menyadari akan besar manfaatnya teknologi informasi Pemerintah Kabupaten bone berinisiatif untuk membangun jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses antar wilayah. Inisiatif pembangunan jaringan TIK dimulai sejak tahun 2005.

Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari terbitnya Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 /2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelola Keuangan Negara, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong organisasi public untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggung jawab. Sebab, apabila dikelola secara baik dan bertanggungjawab, organisasi publik tersebut akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*). Lebih lanjut menurut Sudikno, peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan. Hal senada juga disampaikan oleh Sabian Utsman dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (hal.17), *das sollen* dan *das sein* ditemukan dalam penelitian hukum.

Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), pada tataran ini lebih pada kajian dasar-dasar normative (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Adapun kendala yang terjadi sebelum menggunakan aplikasi tersebut masyarakat sangat sulit untuk melakukan pembayaran pajak sehingga pembayaran pajak masyarakat banyak tidak lancar. Oleh karena itu, pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sangat sulit dalam menyusun laporan keuangan

Penelitian ini terfokus pada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Bone menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPAD) untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Teknologi informasi yang di gunakan berbasis online seperti contoh pajak menggunakan aplikasi simpad adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk proses transaksi pengiriman surat dan barang. Adapun Retribusi adalah pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut, orang membayar Retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Retribusi menggunakan aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi Pajak Daerah) adalah salah satu sarana pendukung berbasis teknologi informasi yang dapat membantu daerah dalam mengelola pajak daerah secara optimal (Hutauruk, 2020; Puspitasari & Pratiwi, 2021). Penerapan sistem informasi manajemen pajak daerah akan mengotomatisasi sebagian pekerjaan daerah sehingga waktu kerja dan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah menjadi lebih optimal. SIMPAD (Sistem Informasi Pajak Daerah) sudah dapat digunakan sejak tahun 2019, maksud dan tujuan dari pengadaan software system informasi manajemen pajak daerah ini adalah terimplementasinya SIMPAD sebagai alat bantu berbasis teknologi informasi yang mampu memudahkan dalam optimalisasi pengelolaan pajak

daerah baik dari percepatan proses kerja, akuntabilitas, hingga standarisasi prosedur kerja.

Potensi pajak yang dimiliki akan dapat dicapai secara optimal jika proses pengelolaan pajak yang dilaksanakan oleh daerah didukung berbagai perangkat mulai dari regulasi, perjanjian kerja sama dengan institusi lain, standar operasional, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung (Amin, 2019; Hasibuan, 2021; Sastrohadiwiryono & Syuhada, 2021). Sebagaimana diatur dalam UU PDRD, pemerintah kabupaten/kota memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola 11 jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sistem itu akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah, sehingga melalui sistem ini pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dapat meningkat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 2 bulan bertempat di kantor Bapenda Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui variabel Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap kinerja Instansi Pemerintah ( Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone). Jumlah PNS di kantor Bapenda Kabupaten Bone 48 orang maka sampel yang diambil sebanyak 32 Orang. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi, teknik analisis data menggunakan SPSS dengan Regresi linear berganda.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, awalnya berdiri disebut Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 1982. Kemudian dengan berlakunya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 112 tahun 1990, dan dijabarkan ke Peraturan Daerah Kabupaten Bone tahun 1991. Struktur organisasi berubah menjadi struktur yang memakai pendapatan Sturuktural menjadi pendapatan Fungsionl yang kala itu disebut dengan sistem MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem MAPATDA adalah suatu rangkaian pekerjaan pengelolaan administrasi pendapatan Daerah mulai proses Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembukuan Pelaporan dan Penagihan. Struktur Badan Pendapatan Daerah berubah ketiga kalinya yang diawali dengan adanya Undang-Undang pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Dipenda Tk.II Bone berubah menjadi Dipenda Kabupaten Bone. Dengan berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007, struktur organisasi Dipenda Kabupaten Bone berubah lagi dengan pedoman pada peraturan Daerah Kab.Bone Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone. Dan kemudian dijabarkan Melalui Keputusan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2008.

Selanjutnya peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 14 Mei 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone. Perda tersebut kemudian di jabarkan dalam peraturan Bupati Bone Nomor: 28 tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bone Nomor 54 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekertariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) mengalami perubahan nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada tanggal 1 Januari 2017. Yang berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

### **Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah

di Badan Pendapatan Daerah. Analisis regresi linier berganda dipilih untuk menganalisis pengajuan hipotesis dalam penelitian ini

### 1) Regresi Linear Berganda X1 dan X2 Terhadap Y

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Uji Statistik t) dan simultan (Uji Statistik f). Dalam penelitian ini pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

**Tabel 1.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien B
(Contan)	-.041
X1	.180
X2	.519

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linier berganda, untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal terhadap variabel dependen kinerja instansi pemerintah. Variabel pemanfaatan teknologi dan variabel pengendalian internal.

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda Indikator-indikator Variabel Pemanfaatan Perangkat Informasi (X<sub>1</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y) secara Parsial

#### 1. Pemanfaatan Software (X<sub>1</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)

**Tabel 2.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Pemanfaatan Software (X<sub>1</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 <sup>a</sup>	.700	.690	2.03482

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Software

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .700, hal ini berarti pemanfaatan software (X<sub>1</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y) sebesar 0,700 atau 70%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemanfaatan software (X<sub>1</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh besar, yaitu berpengaruh sebesar 70%.

**2. Pemanfaatan Hardware (X<sub>2</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)**

**Tabel 3.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Pemanfaatan Hardware (X<sub>2</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.488	.471	2.65681

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan hardware

Berdasarkan hasil uji regresi linier sedehana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .488, hal ini berarti pemanfaatan hardware (X<sub>1</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y) sebesar 0,488 atau 48,8%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemanfaatan hardware (X<sub>1</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh sedang, yaitu berpengaruh sebesar 48,8%.

**3. Pemanfaatan Hardware (X<sub>3</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)**

**Tabel 4.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Pemeliharaan Sistem Jaringan (X<sub>3</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 <sup>a</sup>	.639	.627	2.23127

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Sistem Jaringan

Berdasarkan hasil uji regresi linier sedehana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .633, hal ini berarti pemeliharaan sistem jaringan (X<sub>3</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y) sebesar 0,633 atau 63,3%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemeliharaan sistem jaringan (X<sub>3</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh besar, yaitu berpengaruh sebesar 63,3%.

**4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>4</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)**

**Tabel 5.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

(Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_4$ ) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492 <sup>a</sup>	.242	.217	3.23245

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .242, hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi ( $X_4$ ) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,242 atau 24,4%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemanfaatan teknologi informasi ( $X_4$ ) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y), berpengaruh kecil, yaitu berpengaruh sebesar 24,4%.

#### 5. Pemanfaatan Pengelolaan Data Keuangan ( $X_5$ ) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda (Pemanfaatan Pengelolaan Data Keuangan ( $X_4$ ) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 <sup>a</sup>	.250	.225	3.21576

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Pengelolaan Data Keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .250, hal ini berarti pemanfaatan pengelolaan data keuangan ( $X_5$ ) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,250 atau 25%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemanfaatan teknologi informasi ( $X_5$ ) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y), berpengaruh kecil, yaitu berpengaruh sebesar 25%.

**6. Adanya Jadwal Pemeliharaan Komputer (X<sub>6</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

**Tabel 7.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Adanya Jadwal Pemeliharaan Komputer (X<sub>6</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 <sup>a</sup>	.616	.603	2.30108

a. Predictors: (Constant), Adanya Jadwal Pemeliharaan Komputer

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .616, hal ini berarti adanya jadwal pemeliharaan komputer (X<sub>6</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,616 atau 61,6%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator adanya jadwal pemeliharaan komputer (X<sub>6</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y), berpengaruh besar, yaitu berpengaruh sebesar 61,6%

**7. Adanya Pembaharuan Perangkat Hardware dan software (X<sub>7</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

**Tabel 8.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Adanya Pembaharuan Perangkat Hardware dan software (X<sub>7</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.528 <sup>a</sup>	.279	.255	3.15289

a. Predictors: (Constant), Adanya Pembaharuan Perangkat Hardware dan software

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .279, hal ini berarti adanya pembaharuan perangkat hardware dan software (X<sub>7</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,279 atau 27,9%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator Adanya Pembaharuan Perangkat Hardware dan software

(X<sub>7</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh kecil, yaitu berpengaruh sebesar 27,9%.

### 8. Adanya Perbaikan Jaringan (X<sub>8</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)

**Tabel 9.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Adanya Perbaikan Jaringan (X<sub>8</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 <sup>a</sup>	.581	.567	2.40232

a. Predictors: (Constant), Adanya Perbaikan Jaringan

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .581, hal ini berarti adanya perbaikan jaringan (X<sub>8</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y) sebesar 0,581 atau 58,1%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator adanya perbaikan jaringan (X<sub>8</sub>) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh sedang, yaitu berpengaruh sebesar 58,1%.

**Tabel 10.** Rekapitulasi Nilai Hasil Uji Regresi Linier Berganda secara Parsial  
 Pengaruh Indikator Variabel Pemanfaatan Perangkat Informasi (X)  
 Terhadap Kinerja Instansi (Y)

Indikator Variabel X	Besar Pengaruh terhadap Variabel Y
1 Pemanfaatan Software (X <sub>1</sub> )	70%
2 Pemanfaatan Hardware (X <sub>3</sub> )	63,9%
3 Adanya Jadwal Pemeliharaan Komputer (X <sub>6</sub> )	61,6%
4 Adanya Perbaikan Jaringan (X <sub>8</sub> )	58,1%
5 Pemanfaatan Hardware (X <sub>2</sub> )	48,8%
6 Adanya Pembaharuan Perangkat Hardware dan software (X <sub>7</sub> )	27,9%
7 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>4</sub> )	25,0%
8 Pemanfaatan Pengelolaan Data Keuangan (X <sub>5</sub> )	24,2%

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda Indikator-indikator Variabel Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y) secara Parsial**

**1. Adanya Auditor Internal (X<sub>2.1</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)**

**Tabel 11.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Adanya Auditor Internal (X<sub>2.1</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 <sup>a</sup>	.440	.422	2.77725

a. Predictors: (Constant), adanya auditor Internal

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .440, hal ini berarti adanya auditor internal (X<sub>2.1</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,440 atau 44%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator adanya auditor internal (X<sub>2.1</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y), berpengaruh sedang, yaitu berpengaruh sebesar 44%.

**2. Adanya Prosedur Terintegritas (X<sub>2.2</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)**

**Tabel 12.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Adanya Prosedur Terintegritas (X<sub>2.2</sub>) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 <sup>a</sup>	.638	.626	2.23480

a. Predictors: (Constant), Adanya prosedur yang terintegritas

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .638, hal ini berarti adanya prosedur yang terintegritas (X<sub>2.2</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,638 atau 63,8%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator adanya auditor internal (X<sub>2.2</sub>) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y), berpengaruh besar, yaitu berpengaruh sebesar 63,8%.

**3. Struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan (X2.3) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)**

**Tabel 13.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda (Struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan (X2.3) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.488	.471	2.65681

a. Predictors: (Constant), Struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .488, hal ini berarti struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan (X2.3) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,488 atau 48,8%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan (X2.3) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y), berpengaruh sedang, yaitu berpengaruh sebesar 48,8%.

**4. SPI Memiliki Prosedur Penilaian Resiko (X2.4) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)**

**Tabel 14.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda (SPI Memiliki Prosedur Penilaian Resiko (X2.4) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y))

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.469 <sup>a</sup>	.220	.194	3.27915

a. Predictors: (Constant), SPI Memiliki Prosedur Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .220, hal ini berarti memiliki prosedur penilaian resiko (X2.4) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,220 atau 22%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator memiliki prosedur penilaian resiko (X2.4) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh kecil, yaitu berpengaruh sebesar 22%.

**5. Penerapan Pengendalian (X2.5) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)**

**Tabel 15.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Penerapan Pengendalian (X2.5) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 <sup>a</sup>	.465	.448	2.71452

a. Predictors: (Constant), Penerapan Pengendalian

Berdasarkan hasil uji regresi linier sedehana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .465, hal ini berarti penerapan pengendalian (X2.5) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y) sebesar 0,465 atau 46,5%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator penerapan pengendalian (X2.5) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh sedang, yaitu berpengaruh sebesar 46,5%.

**6. Adanya Aktifitas Pengendalian (X2.6) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)**

**Tabel 16.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 (Adanya Aktifitas Pengendalian (X2.6) terhadap Kinerja Instansi Pemerinatah (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.596	.583	2.35914

a. Predictors: (Constant), Adanya Aktifitas Pengendalian

Berdasarkan hasil uji regresi linier sedehana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .596, hal ini berarti struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan (X2.6) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y) sebesar 0,596 atau 59,6%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator adanya aktifitas pengendalian (X2.6) terhadap kinerja instansi pemerinatah (Y), berpengaruh sedang, yaitu berpengaruh sebesar 59,6%.

**7. SPI Sudah Mempunyai Kebijakan dan Prosedur (X2.7) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)**

**Tabel 17.** Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda (SPI Sudah Mempunyai Kebijakan dan Prosedur (X2.7) terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 <sup>a</sup>	.700	.690	2.03482

a. Predictors: (Constant), SPI Sudah Mempunyai Kebijakan dan Prosedur

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .700, hal ini berarti SPI sudah mempunyai kebijakan dan prosedur (X2.7) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y) sebesar 0,700 atau 70%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 32 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator SPI sudah mempunyai kebijakan dan prosedur (X2.7) terhadap kinerja instansi pemerintahan (Y), berpengaruh besar, yaitu berpengaruh sebesar 70%.

**Tabel 18.** Rekapitulasi Nilai Hasil Uji Regresi Linier Berganda secara Parsial Pengaruh Indikator Variabel Pengendalian Internal (X2) Terhadap Kinerja Instansi (Y)

No.	Indikator Variabel X2	Besar Pengaruh terhadap Variabel Y <sub>2</sub>
1	SPI Sudah Mempunyai Kebijakan dan Prosedur (X2.7)	70%
2	Adanya Prosedur Terintegritas (X2.2)	63,8%
3	Adanya Aktifitas Pengendalian (X2.6)	59,6%
4	Struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan (X2.3)	48,8%
5	Penerapan Pengendalian (X2.5)	46,5%
6	Adanya Auditor Internal (X2.1)	44%
7	SPI Memiliki Prosedur Penilaian Resiko (X2.4)	22%

### 3) Uji signifikkan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dengan taraf signifikan 5%. Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 19.** Hasil Uji t ( Parsial)

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant )	-.041	1.145		-.036	.971
	TotalX1	.180	.120	.260	1.498	.145
	TotalX2	.519	.127	.705	4.071	<,001

a. Dependent Variable: totally

a) Pengaruh variabel pemanfaatan perangkat informasi (X1) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X1) sebesar  $0,018 < 0,05$ . Dan nilai  $t_{hitung}$  (1.1498)  $> t_{tabel}$  (2,045), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara pemanfaatan perangkat informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

b) Pengaruh pengendalian internal (X2) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X2) sebesar  $<, 001 > 0,05$ . Dan nilai  $t_{hitung}$  (4,071)  $< t_{tabel}$  (2,045), maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  diterimah. Dapat disimpulkan secara parsial pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Untuk membuktikan hasil ,dibuktikan dengan uji t dan f. Dilihat dari uji t pada variabel pemanfaatan perangkat informasi berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pengendalian internal juga berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja instansi pemerintah.

c) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang ada dalam model regresi ini mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen . Berikut dapat dilihat pada tabel hasil uji f di bawah ini:

**Tabel 20.** Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377.010	2	188.505	149.813	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	36.490	29	1.258		
	Total	413.500	31			

a. Dependent Variable: totally

b. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1

Berdasarkan hasil regresi di atas diketahui  $F_{hitung}$  adalah 149,813. Berdasarkan tabel F dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% diketahui bahwa  $T_{tabel}$  dengan  $df1 = k-1 = 3-1 = 2$  dan  $df2 = n-k-2 = 32 - 2 - 2 = 28$ , maka  $F_{tabel} (df1) (df2) = 4,20$ . Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $F_{hitung} = 149,813$  sedangkan  $F_{tabel} 4,20$ , maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan perangkat informasi berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pengendalian internal juga berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja instansi pemerintah.

d) Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen (kinerja instansi pemerintah) dipengaruhi oleh variabel independen (pemanfaatan perangkat informasi dan pengendalian internal). Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21.** Hasil Uji Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 <sup>a</sup>	.912	.906	1.12173

a. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1

Berdasarkan data diatas, diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0, 921 atau (92,1%). Hal ini menunjukkan bahwa 92,1% kinerja instansi pemerintah di pengaruhi

oleh pemanfaatan perangkat informasi dan pengendali internal. Sedangkan 7,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian diuraikan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan pembahasan data yang telah diuraikan tersebut. Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan secara terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan, maka keseluruhan data yang diperoleh dari responden untuk masing-masing variabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **Pengaruh Secara Parsial Pemanfaatan Perangkat Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

- a. Pengaruh Pemanfaatan Software ( $X_1$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan software ( $X_1$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang besar pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- b. Pengaruh Pemanfaatan Hardware ( $X_2$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan hardware ( $X_2$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang sedang pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- c. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Jaringan ( $X_3$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan ( $x_3$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang besar pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- d. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_4$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan ( $x_3$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang kecil pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- e. Pengaruh Pemanfaatan Pengelolaan Data Keuangan ( $X_5$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan

pengelolaan data keuangan ( $X_5$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang kecil pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

- f. Pengaruh Adanya Jadwal Pemeliharaan Komputer ( $X_6$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa adanya jadwal pemeliharaan komputer ( $X_6$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang besar pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- g. Pengaruh Adanya Pembaharuan Perangkat Hardware dan software ( $X_7$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa adanya pembaharuan perangkat hardware dan software ( $X_7$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang kecil pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- h. Pengaruh Adanya Perbaikan Jaringan ( $X_8$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa adanya perbaikan jaringan ( $X_8$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang sedang pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

### **Pengaruh Secara Parsial Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

- a. Pengaruh Adanya Auditor Internal ( $X_{2.1}$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan ( $X_{2.1}$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang sedang pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- b. Pengaruh Adanya prosedur yang terintegritas ( $X_{2.2}$ ) terhadap kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan ( $X_{2.2}$ ) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang besar pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- c. Pengaruh Struktur SPI Mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan ( $X_{2.3}$ ) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan ( $X_{2.3}$ ) terhadap kinerja

instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang sedang pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

- d. Pengaruh SPI Memiliki Prosedur Penilaian Resiko (X2.4) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan (X2.4) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang kecil pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- e. Pengaruh Penerapan Pengendalian (X2.5) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan (X2.5) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang sedang pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- f. Pengaruh Adanya Aktifitas Pengendalian (X2.6) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan (X2.6) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang sedang pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.
- g. Pengaruh SPI Sudah Mempunyai Kebijakan dan Prosedur (X2.7) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan sistem jaringan (X2.7) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki pengaruh yang besar pada instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

#### **Pengaruh Secara Simultan Pemanfaatan Perangkat Informasi (X1) dan Pengendalian Internal (X2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat 20 item yang seluruhnya valid, karena hasil nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,338). Dapat disimpulkan bahwa, pernyataan sebanyak 20 butir item adalah pernyataan valid.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai *Cronbach Alpha*, dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari tiap variabel yaitu variabel X1 (0,878), X2 (0,861),  $> 0,60$ , yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut reliabel atau andal.

Hasil pengujian pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen menunjukkan Variabel X1 nilai  $t_{hitung}$  (1,1498)  $> t_{tabel}$  (2,045) artinya

berpengaruh dan Variabel X2 nilai  $t_{hitung} (4,071) < t_{tabel} (2,045)$  artinya berpengaruh juga.

Variabel X1 dan X2 sama-sama berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh pemanfaatan perangkat informasi dan pengendalian internal, maka demikian hipotesis yang diajukan peneliti diterima.

Dilihat dari uji dan data yang didapat, untuk pengujian regresi yaitu uji t dan uji f. Pengujian parsial hasil untuk kedua variable memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil pengujian simultan kedua variabel juga memiliki pengaruh yang signifikan.

### **KESIMPULAN**

Pemanfaatan perangkat informasi secara parsial mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai  $t_{hitung} (1,1498) > t_{tabel} (2,045)$  artinya berpengaruh dan nilai signifikan sebesar  $0,018 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara pemanfaatan perangkat informasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Kemudian, Pengendalian internal secara parsial mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai  $t_{hitung} (4,071) > t_{tabel} (2,045)$  artinya berpengaruh dan nilai signifikan sebesar  $<0,001 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Terakhir, pemanfaatan perangkat informasi dan pengendalian internal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap k kinerja instansi pemerintah. dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 149,813 dan nilai  $F_{tabel} 4,20$  berarti Pemanfaatan perangkat informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

### **REFERENSI**

- A'yun, L. Q., & Hartaman, N. (2021). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Planning Budget in Maros Regency. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 65–72.
- Ahyari, F., & Ayem, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Haryadi, H. (2009). *Administrasi perkantoran untuk manajer & staf*. VisiMedia.
- Hasibuan, A. A. (2021). Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Hutauruk, U. A. (2020). *Analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah berbasis SISMIO dan SIMPADU di Kabupaten Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Iskandar, R., Sikumbang, N., & ... (2019). Perancangan Multimedia Building Center Padang, Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. In ... *Research, Faculty of ... UNIVERSITAS BUNG HATTA*.  
<https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFTSP/article/view/14058>
- Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Kurniawan, W. (2017). Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Desentralisasi. *Jurnal Selat*, 4(2), 160–189.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02).
- Nauap, N. F., Ulfah, Y., & Setiawaty, A. (2016). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 1(1), 25–33.
- Pituringsih, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrua Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris

- Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(1), 62–73.
- Puspitasari, M. E., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12.
- Santoso, M. B., Irfan, M., & Nurwati, N. (2020). Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 170–183.
- Sastrohadiwiryono, S., & Syuhada, A. H. (2021). *Manajemen tenaga kerja Indonesia*. Bumi aksara.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.